



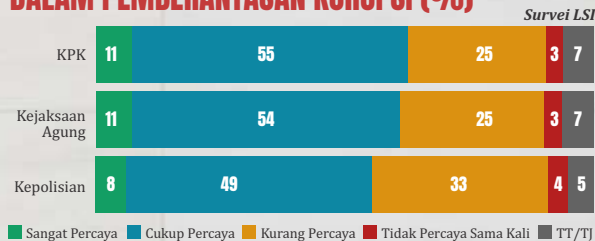
SERANGAN BALIK, ENDAR NGAKU DIPAKSA FIRLI BIKIN LAPORAN KORUPSI



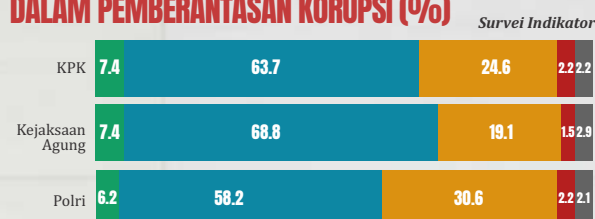
Terungkap mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro ternyata melaporkan banyak hal kepada Dewan Pengawas (dewas). Salah satu yang mengejutkan, ia mengaku dipaksa membuat laporan korupsi suatu kasus. Padahal belum ada hasil ekspose yang memberikan instruksi, atau bahkan memutuskan adanya kejadian tindak pidana. Endar menegaskan bahwa pemaksaan tersebut sudah menyalahi aturan. Ia menyebut apabila dipandang secara pidana, perbuatan tersebut sudah melawan hukum. Tapi masih menjadi teka-teki kasus apa yang dimaksud Endar tersebut. Di sisi lain, saat pemeriksaan lima pimpinan KPK, Ketua komisi anti-rasuah Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak tidak masuk dan keluar dari pintu utama Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2023). Mereka kabur melalui pintu khusus. Berbeda dengan kedatangan pimpinan KPK lainnya, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata yang masuk lewat pintu utama. Lho!

(Baca Hal 11)

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (%)



KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (%)



**Government
(Hal.2)
Kasus Baru
Corona di RI
Nyaris Seribu**

KPK

Kasus Baru Corona di RI Nyaris Seribu Kemenkes Klaim Omicron Arcturus Belum Masuk



Masyarakat tetap diimbau untuk bermasker terutama di tempat umum saat musim mudik lebaran tahun ini kerana kenaikan kasus bari corona mulai terjadi lagi. (dok.ist)

JAKARTA-Indonesia mencatat sebanyak kasus baru COVID-19 nyaris seribu atau tepatnya 987 kasus per Rabu (12/4/2023). Sementara, kasus aktif kini sebanyak 7.457 kasus.

Perkembangan kasus virus corona di Indonesia memang kembali menunjukkan tren peningkatan kasus. Dalam sepekan misalnya, kenaikan kasus konfirmasi Covid-19 mencapai 45,74 persen, pun dengan kasus kematian Covid-19 yang dilaporkan meningkat mencapai 44 persen.

Rinciannya, selama periode 29 Maret-4 April, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan berjumlah 2.949 kasus, lalu naik menjadi 4.298 kasus konfirmasi Covid-19 selama rentang periode 5-11 April.

Sementara untuk kasus kematian Covid-19, tercatat selama sepekan terakhir berjumlah 36 kasus. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan periode 29 Maret-4 April yang mencatatkan 25 kasus kematian. Bahkan pada Selasa (11/4), kasus kematian Covid-19 harian juga melonjak menjadi 14 kasus, jumlah itu merupakan penambahan kasus kematian tertinggi di Indonesia terhitung sejak 2 Januari 2023.

Sejumlah pihak menilai kenaikan ini terjadi imbas penularan subvarian Omicron XBB 1.16 alias Arcturus yang menjadi varian baru yang dikhawatirkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Subvarian ini telah dilaporkan di 22 negara, dengan sebagian besar kasus ditemukan di India. Arcturus juga menjadi salah satu penyebab kenaikan kasus Covid-19 di India belakangan ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim belum ada subvarian Arcturus yang terdeteksi di Indonesia.

"Belum ada varian baru ditemukan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Rabu (12/4/2023).

Nadia menilai salah satu faktor pemicu kenaikan kasus belakangan ini lantaran protokol kesehatan yang sudah tidak ketat dilaksanakan

masyarakat. Selain itu, aktivitas testing dan tracing semakin menurun di masyarakat. "Masyarakat cenderung tidak tes sehingga kalau merasa batuk pilek, istirahat, dan merasa sembuh," ujarnya.

Ahli Ingatkan Tetap Bermasker

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang memantau Omicron varian XBB.1.16 yang dikatakan menyebabkan lonjakan kasus Covid di India dan telah terdeteksi di lebih dari 20 negara. Epidemiolog Masdalina Pane mengatakan varian itu "mestinya sudah masuk" ke Indonesia, hanya saja mungkin belum terdeteksi karena pemeriksaan di laboratorium yang menggunakan sampling— hal yang menjadi salah satu persoalan dalam penanganan Covid di Indonesia.

Namun, dia mengatakan

masyarakat "tidak perlu terlalu khawatir" karena varian itu tidak ganas. "Tetapi bukan berarti kita tidak waspada karena pada mereka-mereka yang berisiko tinggi, yang komorbid, usia lanjut, kelainan imun, itu masih menimbulkan gejala berat. Karena itu, kematian juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan kasus," kata Masdalina Rabu (12/4/2023).

Meski masyarakat diimbau tidak perlu khawatir, peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global, Dicky Budiman, mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar "jangan sampai keterlepasan, bebas sebeb-asbebnya" karena itu bisa memicu masalah besar.

Selain kelompok rentan, anak-anak juga masuk kelompok berisiko karena varian terbaru ini banyak ditemukan menginfeksi anak-anak di India. "Artinya mereka juga harus dilindungi. Kalau mereka belum bisa menerima vaksin, ya orang di sekitarnya yang harus sudah booster [vaksin], berperilaku hidup bersih sehat," ujar Dicky.

Ilmuwan China Sebut Berasal dari Manusia

Seorang ilmuwan di China mengungkapkan kemungkinan COVID-19 berasal dari manusia. Hal ini menyusul desakan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada China untuk bersikap transparan perihal data asal-usul virus Corona. Seperti

apatemuannya?

Kemungkinan tersebut diungkapkan oleh Tong Yigang dari Universitas Teknologi Kimia Beijing. Ia mengacu kepada sampel virus yang diambil dari Pasar Makanan Laut Huanan di Wuhan. Sampel dari pasar yang dianggap sebagai titik nol pandemi COVID-19 tersebut ditemukan 'hampir identik' dengan sampel pasien yang terpapar virus Corona. Dari sanalah ia menyebut, ada kemungkinan COVID-19 berasal dari manusia.

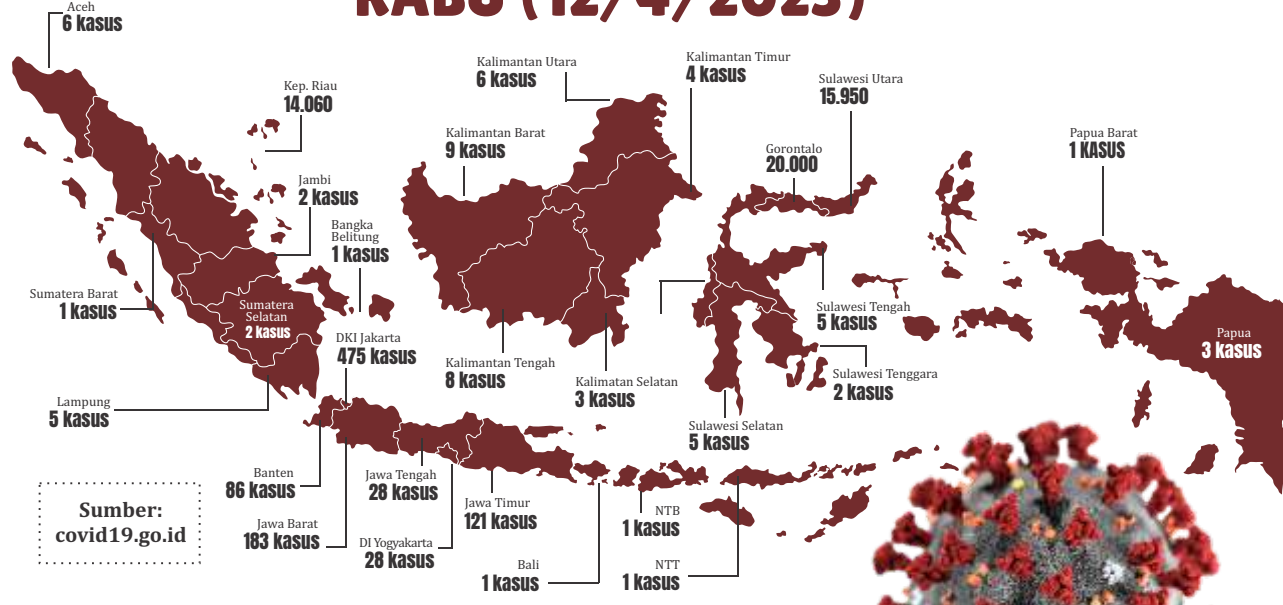
Dikutip dari konferensi pers yang diadakan oleh Dewan Negara China mengenai penelitian asal mula virus Corona, Tong menjelaskan lebih dari 1.300 sampel lingkungan dan hewan beku telah diambil di pasar antara Januari 2020 dan Maret 2020. Para peneliti telah mengisolasi tiga strain virus dari sampel.

Ia juga mengatakan, hingga kini belum ada cukup bukti untuk mendukung penelitian terbaru yang menyatakan anjing rakun adalah asal dari penularan virus COVID-19.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) China, Zhou Lei, menyerukan perlunya kolaborasi ilmiah global dalam melacak asal-usul virus Corona. Sebab menurutnya, situs tempat COVID-19 teridentifikasi pertama kali belum tentu merupakan asal muasal virus Corona.

Mengingat, China banyak dikritik karena dianggap menghalangi penyelidikan internasional perihal asal-usul virus Corona. Awal pekan ini, WHO menegaskan pihaknya masih belum memiliki data kunci dari China perihal awal wabah. (wid,rls,bbc,kum/dya)

SEBARAN CORONA DI INDONESIA, RABU (12/4/2023)



RPKPU Pencalonan DPR-DPRD dan DPD Disetujui Regulasi Eks Napi Jadi Caleg Minta Diperjelas

JAKARTA - Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan peraturan komisi pemilihan umum (RPKPU) masing-masing terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD, serta mengenai pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Dalam pembahasan disinggung perihal peraturan mantan narapidana (napi) yang ingin menjadi calon legislatif dinilai kurang jelas.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyinggung poin bila napi harus mengumumkan kepada publik bahwa pernah dipenjara. Menurutnya, dalam ketentuan ini perlu diperjelas kembali terkait media apa yang digunakan oleh bakal calon legislative bagi mantan narapidana itu untuk mengumumkan latar belakang dirinya.

Salah satunya pada rumusan redaksional mengenai redaksional mengenai syarat calon yang pernah menyanggah status sebagai narapidana.

"Disana ada kewajiban untuk mengumumkan jati dirinya bahwa yang bersangkutan pernah diancam pidana baik itu lima tahun atau lebih terkait dengan jenis tindak pidana apa dia diancam, (seperti) makar, maupun politik dan sebagainya. Perlu dipertegas, kewajiban untuk mengumumkan jati dirinya ini melalui media apa?" kata Agung Rabu (12/4/2023).

Menurutnya, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, banyak bermunculan media-media, bahkan dalam konteks personal pun bisa mempunyai medianya sendiri. "Kita tahu perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, sekarang ini kan ada media cetak, elektronik, dan juga media online. Lalu di antara media cetak, elektronik, dan online ini ada tidak kewajiban untuk mengumumkan menggunakan media utama? Bagaimana kalau menggunakan media internal?," sambungnya.

Untuk diketahui, Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan peraturan komisi pemilihan umum (RPKPU). "Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyetujui RPKPU sebagai berikut Rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Rancangan PKPU tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal tersebut merupakan hasil kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta. Meskipun begitu, lanjut Junimart, KPU RI perlu



Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, Ketua DKPP Hedy Lugito dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/4/2023). (istimewa)

memperhatikan masukan-masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP RI terkait dengan beberapa materi yang dimuat dalam RPKPU tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah memaparkan sejumlah hal yang diatur lembaganya dalam dua RPKPU itu, di antaranya dalam RPKPU terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD, tahapan pencalonan meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap.

Berikutnya mengenai RPKPU tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU memberikan penambahan syarat bakal calon anggota DPD, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Syarat tersebut di antaranya adalah bakal calon tidak pernah menjadi terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelaku mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Kedua, mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang kepada publik.

Partai Buruh: Perlu Pangkas Persyaratan

Di sisi lain, Partai Buruh mengingatkan KPU agar tidak tunduk pada apa pun kehendak dari Komisi II

DPR. Partai Buruh mengingatkan hal itu karena KPU dijadwalkan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR guna membahas antara lain rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD pada hari ini. "RDP sebagai forum konsultasi antara KPU dan DPR boleh saja digelar. Tetapi harus diingat, tidak boleh ada pemaksaan kehendak dari Komisi II kepada KPU. Apa pun masukan yang disampaikan DPR, KPU tidak wajib mengikuti apalagi terikat pada keinginan mereka," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan, ketentuan tersebut telah tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 dan ditegaskan kembali pada perkara yang dimohonkan Partai Buruh melalui Putusan Nomor 78/PUU-XX/2022. "Oleh sebab itu, agar proses pembentukan PKPU menjadi lebih fair, selain mendengar masukan dari parpol parlemen melalui Komisi II, sudah semestinya KPU juga perlu mendengar masukan dari parpol nonparlemen," tuturnya.

Dia mengungkapkan pada 6 April 2023 di Kantor Partai Buruh, enam parpol nonparlemen sudah merumuskan sejumlah isu aturan pencalonan anggota DPR dan DPRD. "Keenam parpol tersebut adalah Partai Buruh, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN)," ungkapnya.

Said membeberkan setidaknya ada beberapa persyaratan pencalonan yang oleh parpol-parpol nonparlemen dinilai terlalu kaku, tidak diperlukan, dan bahkan menyulitkan bagi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg. Pertama, soal syarat ijazah. Selain fotokopi ijazah yang dilegalisir, kata dia, semestinya KPU juga dapat memberikan opsi lain berupa hasil scan atau pindai ijazah asli misalnya.

Kedua, soal syarat bukan terpidana. Semestinya, lanjut dia,

bacaleg yang diwajibkan mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari pengadilan negeri hanya ditujukan kepada bacaleg yang berstatus mantan terpidana. Sementara bacaleg yang tidak pernah dipidana, menurut dia, tidak perlu mengurus dokumen tersebut. Dia menambahkan, surat pernyataan di atas meterai itu tentu sudah lebih dari cukup bagi bacaleg yang tidak pernah dipidana.

Dia melanjutkan, surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, jika harus diurus di instansi berbeda, ini tentu juga memberatkan. Dia menuturkan, KPU sebetulnya memiliki kemampuan untuk membangun kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) misalnya untuk membangun pelayanan satu atap guna kepentingan penerbitan dokumen tersebut di setiap daerah. "Biaya pengurusan ketiga dokumen tersebut terbilang cukup mahal. Nah, beberapa contoh masukan persyaratan bacaleg dari parpol-parpol nonparlemen tersebut perlu diperhatikan oleh KPU. Tidak adil kalau KPU hanya meminta masukan dari parpol parlemen saja," imbuhnya. (wid,rls,svp,kum/dya)

JUMLAH DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI 38 PROVINSI INDONESIA PADA PEMILU 2024

1. Jawa Barat	11 Dapil
2. Jawa Timur	11 Dapil
3. Jawa Tengah	10 Dapil
4. Sumatra Utara	3 Dapil
5. Sulawesi Selatan	3 Dapil
6. Banten	3 Dapil
7. DKI Jakarta	3 Dapil
8. Lampung	2 Dapil
9. Sumatra Selatan	2 Dapil
10. Sumatra Barat	2 Dapil
11. Aceh	2 Dapil
12. Riau	2 Dapil
13. Nusa Tenggara Timur	2 Dapil
14. Kalimantan Barat	2 Dapil
15. Nusa Tenggara Barat	2 Dapil
16. Kalimantan Selatan	2 Dapil
17. Bali	1 Dapil
18. Jambi	1 Dapil
19. DI Yogyakarta	1 Dapil
20. Kalimantan Timur	1 Dapil
21. Sulawesi Tengah	1 Dapil
22. Kalimantan Tengah	1 Dapil
23. Sulawesi Utara	1 Dapil
24. Sulawesi Tenggara	1 Dapil
25. Bengkulu	1 Dapil
26. Kepulauan Riau	1 Dapil
27. Sulawesi Barat	1 Dapil
28. Maluku	1 Dapil
29. Kep. Bangka Belitung	1 Dapil
30. Kalimantan Utara	1 Dapil
31. Gorontalo	1 Dapil
32. Maluku Utara	1 Dapil
33. Papua	1 Dapil
34. Papua Selatan	1 Dapil
35. Papua Tengah*	1 Dapil
36. Papua Pegunungan*	1 Dapil
37. Papua Barat*	1 Dapil
38. Papua Barat Daya*	1 Dapil

*provinsi/dapil baru

Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Trans Sulawesi KPK Amankan 25 Orang dan Sita Miliaran Rupiah



Kereta api Makassar-Parepare merupakan kereta api pertama di Sulawesi dan bagian dari pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi yang saat ini sedang diselidiki KPK karena dugaan adanya korupsi. (Dok. BKIP Kemenhub.)

JAKARTA - KPK menyita uang miliaran rupiah dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Selain mata uang rupiah, KPK turut menyita ribuan dolar Amerika Serikat (AS). Sejauh ini komisi anti-rasuah juga telah mengamankan sekitar 25 orang diduga terlibat. Ironi, sebab pada 29 Maret 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru meresmikan proyek ini.

"Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran

Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya.

Ali mengatakan mereka yang diamankan dalam OTT ini adalah para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta. "Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," katanya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan belum ada

rupiah," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/4/2023). "Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat. Perkembangan segera akan disampaikan," sambung Ali.

Sementara itu, total pihak yang diamankan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi ini sebanyak 25 orang. Penangkapan dilakukan di wilayah

langkah strategis yang diambil terkait kasus ini. "Terkait hal ini kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya," ungkap Adita dikutip di detikcom.

Dalam hal pemberantasan korupsi di DJKA, Adita mengatakan akan selalu siap bekerja sama dengan KPK. "Kami siap bekerja sama penuh dengan KPK dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Adapun kereta Trans Sulawesi sendiri belum lama ini baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertahun-tahun dibangun. Jokowi meresmikan kereta api Trans Sulawesi dengan rute Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 29 Maret 2023 yang lalu.

Dalam peresmian itu, Jokowi mengatakan untuk saat ini proses pembangunan masih dilakukan bertahap yakni dari Makassar ke Parepare. Rencana besarnya Trans Sulawesi akan tersambung sampai Manado.

Namun saat ini yang baru siap dioperasikan hanya untuk rute Maros-Barru sepanjang 80 kilometer. "Saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini, jalur kereta api Trans Sulawesi yang nantinya insyaallah akan

sambung menyambung dari Makassar sampai ke Sulawesi Utara di Manado," kata Jokowi dalam peresmian Kereta Api Makassar-Parepare di Depo Kereta Api Maros.

Untuk diketahui, pembangunan kereta api pertama di Sulawesi itu memakan waktu hingga tujuh tahun, terhitung sejak 2015 hingga 2022. Kepala Operasional dan Layanan KA Trans Sulawesi, Rizqi Prasetyo mengungkapkan peletakan batu pertama (groundbreaking) lintasan kereta dari Makassar hingga Parepare, Sulawesi Selatan dilakukan pada 2015.

Menariknya, ukuran rel kereta api di Sulawesi diklaim lebih besar dibandingkan lintasan di Pulau Jawa. Rizqi mengungkapkan rel kereta api di Sulawesi memiliki lebar 1.435 milimeter (mm). "Dengan rel yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar juga" ujarnya. Hingga saat ini, lintasan kereta api di Sulawesi yang sudah terbangun kurang lebih 110 kilometer (km). Jalur kereta api itu, terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Barru. Namun, rute kereta yang baru beroperasi selama masa uji coba adalah Stasiun Garongkong di Kabupaten Barru sampai Stasiun Mangilu di Kabupaten Pangkep. (wid,rls,kum/dya)

Mahfud Md Ungkap Tugas Prioritas Satgas: Usut Transaksi Rp 189 T

JAKARTA - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD menjelaskan soal rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Komite TPPU. Adapun Satgas ini untuk menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan. Tapi yang menjadi prioritas satgas adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) senilai Rp 189 triliun.

Menurut Mahfud, Satgas nantinya bertugas melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) dan LHP. "Sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu kemarin. Terhadap LHP senilai Rp 189 triliun lebih telah dilakukan proses hukum untuk pelaku perseorangan sampai putusan di tingkat PK, di mana dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dan untuk pelaku korporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah. Oleh karena itu satgas akan memprioritaskan untuk meneliti LHP senilai Rp 189 triliun ini," katanya di akun Instagram pribadinya, Rabu (12/4/2023).

Tetapi, kata Mahfud, jika ada putusan inkrah tapi ada kesalahan, hal itu bisa menjadi tindak pidana asal. TPPU-nya harus dicari. "Jadi kalau

udah ada yang inkrah sebagai suatu kesalahan tentu kemudian menjadi tindak pidana asal. Yang TPPU nya harus dicari," ujarnya.

Satgas ini juga akan mendalami hal-hal yang masalahnya sudah ditindaklanjuti. Berdasarkan hukum TPPU, meskipun sudah ditindaklanjuti namun belum tentu diselesaikan. "Satgas nanti akan mendalami hal-hal yang dilaporkan bahwa isunya atau masalahnya sudah ditindaklanjuti. Sudah banyak yang ditindaklanjuti. Tapi kita akan mendalami lagi sebab menurut hukum TPPU, yang ditindaklanjuti itu belum tentu diselesaikan. Justru yang ditindaklanjuti itu hasilnya bisa jadi pintu masuk untuk masuk ke proses TPPU-nya," jelasnya.

Adapun pembentukan satgas sudah mendapatkan dukungan dari komisi III DPR RI. Satgas akan dibentuk setelah bahan-bahan yang ditentukan terhimpun. "Dalam waktu tidak lama Insyaallah saya akan bentuk satgas ini setelah menghimpun bahan-bahan yang ditentukan," pungkasnya.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pihaknya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya akan melakukan tindak lanjut untuk menentukan langkah-langkah hukum terkait nilai transaksi Rp 189 triliun.

"Kemenkeu bersama PPATK dan APH lainnya di bawah koordinasi Komite TPPU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama (case building) dalam rangka menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya," tulisnya dalam postingan Instagram resminya @smindrawati, dikutip Rabu (12/4/2023).

Pada 27 Maret 2023 lalu, Sri Mulyani telah memaparkan nilai transaksi agregat Rp 189 triliun di Komisi XI dan pada 29 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan nilai transaksi Rp 189 triliun di Komisi III DPR. Sri Mulyani menuturkan bahwa sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga dilakukan peninjauan kembali (PK).

"Kami sampaikan bahwa terhadap Tindak Pidana Asal tersebut yaitu pidana kepabeanaan, telah dilakukan langkah hukum oleh penyidik Ditjen Bea Cukai dan telah diputus oleh pengadilan hingga Peninjauan Kembali di MA," paparnya.



Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menkumham Mahfud MD

Pada tanggal 21 Januari 2016, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan penangkapan dan penindakan atas ekspor emas yang dilakukan melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta oleh salah satu perusahaan. Adanya penangkapan dan penindakan ini dilanjutkan proses penyidikan dan sudah dilakukan sampai proses pengadilan, mulai dari pengadilan negeri 2017 sampai dengan keputusan Mahkamah Agung.

"Hasilnya, untuk putusan akhir pelaku perorangan, jadi ini PT X dengan dua orang pelaku orang putusan akhir terhadap perseorangan, melepaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk putusan akhir terhadap pelaku korporasi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebesar Rp 500 juta," ujarnya. (wid,rls,ist,kum/dya)

Stok Sembako Dikuasai Pemerintah Cukup tapi Tipis, Lho!



Petugas memeriksa daging beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4/2023). (istimewa)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis data stok pangan yang dikuasai pemerintah lewat BUMN pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Terpantau, kondisi cadangan pangan nasional saat ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional

Akibatnya, kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, tidak dapat dilakukan intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu hingga hilir. Dia menjabarkan, pada Januari sampai dengan Mei 2023, secara prinsip ketersediaan atau cadangan pangan masyarakat khususnya beras sangat cukup. Namun, imbuh dia, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih perlu ditingkatkan.

"Kondisi ini sebenarnya kalau kita melihat stok akhir pada bulan Mei nanti prediksi kami akan sangat cukup untuk ketersediaan secara nasional," ujar Ketut dalam diskusi virtual, Rabu (12/4/2023).

Ketut memaparkan, per tanggal 11 April 2023, stok beras hanya berada di angka 292.045 ton, di mana angka tersebut terdiri dari stok CBP Bulog sebesar 270.194 ton, dari komersial sebesar 21.621 ton, dan stok dari ID Food sebanyak 229 ton.

"Ini kondisi terakhir. (Ditambah) pada tanggal 24 Maret 2023 (lalu) Bapak Presiden memerintahkan kepada Bapanas sekaligus kami juga sudah menugaskan Bulog untuk melaksanakan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 21,353 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dan diberikan selama 3 bulan. Dengan demikian beras yang diperlukan kurang lebih sebanyak 640 ribu ton untuk bansos (bantuan sosial)," terangnya.

Dengan kondisi stok beras yang

hanya tersedia 292.045 ton padahal kebutuhan per bulannya adalah sebesar 2.580.897 ton per bulan, Bapanas menugaskan Bulog melakukan importasi beras sebanyak 500.000 ton yang harus didatangkan segera untuk kebutuhan bansos hingga bulan Mei mendatang.

Selain beras, stok pangan lainnya pun mengalami kondisi yang sama kritisnya dengan kondisi stok beras. Diantaranya ada stok kedelai yang hanya tersisa 775,77 ton di mana seharusnya dibutuhkan sebesar 230.718 ton per bulan. Jagung, stoknya hanya tersisa 6,00 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 1.361.438 ton.

Bawang merah stoknya tersisa 0,80 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 91.056 ton. Bawang putih stoknya tersisa 0,60 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 54.317 ton. Cabai stoknya tersisa 0,38 ton di mana kebutuhan per bulannya adalah sebesar 90.849 ton.

Telur ayam stoknya tersisa 115,28 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 490.286 ton. Daging ayam stoknya tersisa 112,31 ton di mana kebutuhan per bulannya adalah sebesar 292.313 ton. Ikan stoknya tersisa 297,40 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 1.339.425 ton.

Daging sapi dan daging kerbau yang masing-masing diantaranya hanya tersisa stok 7.524,91 ton dan 932,33 ton di mana kebutuhan per bulannya sebesar 67.971 ton per bulan.

Lebih lanjut, kondisi stok minyak goreng yang juga dinilai kritis, per 11 April 2023, stok minyak goreng tersisa 16.626,40 kl di mana kebutuhan per bulannya sebesar 610.898 kl per bulan.

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kontrak dengan negara-negara asal impor beras, sehingga dapat dipastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk beberapa bulan ke depan sudah aman. "Sudah dikunci 500 ribu ton, jadi sudah aman. (Sebelumnya) saya gak mau spekulasi, harus pasti semua. Itu kan untuk CBP, kalau CBP nggak ada masalah, cuma saya mendatangkannya bertahap dari yang kuotanya 2 juta tadi, dilihat situasinya, kalau nanti serapan kita banyak ya gak perlu hanya cukup 500 ribu ini, ya selesai," kata Buwas saat ditemui di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta Utara, Rabu (12/4/2023).

Untuk diketahui, Perum Bulog mendapatkan penugasan pengadaan beras impor sebanyak 2 juta ton pada tahun 2023 ini, di mana 500 ribu ton harus didatangkan segera, untuk kebutuhan bantuan pangan atau bansos sebanyak 210 ribu ton per bulan, selama 3 bulan berturut, Maret hingga Mei.

"Artinya saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu, saya sudah kontrak 500 ribu. Kontrak itu bukan berarti harus kontrak tertulis juga, tidak. Kita kerja sama, dengan jaminan mereka, ada jaminan dari kita kan juga sudah sama dengan deal," ujarnya.

Sebelumnya, Buwas sempat enggan menyatakan pihaknya sudah mendapatkan kontrak dari negara asal beras impor. Namun, pada hari ini ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kontrak, dan juga sudah dilakukannya pengecekan kualitas dari beras tersebut. "Sudah (sepakat dan sudah cek lab). Cocok. Hasil labnya

sudah ada di saya kok. Artinya, kualitasnya harus seperti ini, besok kalau mereka datengin gak seperti ini, ya saya komplain," terangnya.

Komoditas lain yang baru saja impor impor daging kerbau beku dari India sebanyak 18.000 ton telah tiba di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4/2023). Kedatangan 18.000 ton impor daging kerbau beku ini merupakan bagian penugasan pemerintah kepada Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100.000 ton sepanjang 2023, sebagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen. (wid,rls,bis/dya)

KETERSEDIAAN SEMBAKO NASIONAL

(per 11 April 2023)

-  Stok jagung milik Perum Bulog tersisa 6,0 ton dari total kebutuhan 1.361.438 ton per bulan.
-  Stok kedelai 335,77 ton dari total kebutuhan per bulan 230.718 ton
-  Stok cabai 0,38 ton dari total kebutuhan 90.849 ton per bulan
-  Stok bawang merah milik Perum Bulog tersisa 0,80 ton dari total kebutuhan 91.056 per bulan
-  Stok bawang putih 0,60 ton dari total kebutuhan 54.317 ton per bulan
-  Stok telur ayam 115,28 ton dari total kebutuhan 490.286 ton per bulan
-  Stok berbagai jenis ikan yang dimiliki ID Food tersisa 297,40 ton dari total kebutuhan 1.339.425 ton per bulan
-  Stok daging ayam baik milik Bulog maupun ID Food tersisa 112,31 ton dari total kebutuhan per bulan 292.313 ton per bulan.
-  Stok minyak goreng tersisa 16.626,40 kl, yang berasal dari stok Perum Bulog sebanyak 5.284,17 kl, ID Food 1.531,23 kl, dan PTPN 9.811,00 kl. Adapun total kebutuhan minyak goreng per bulan sebanyak 610.898 kl.
-  Stok beras dimiliki Perum Bulog sebanyak 291.816 ton dan ID Food 229 ton sehingga jika di total, cadangan beras nasional tersisa 292.045 ton dari total kebutuhan per bulan 2.580.897 ton.
-  Stok daging sapi dilaporkan tersisa 7.524,91 ton dan daging kerbau sebanyak 932,33 ton sehingga di total, persediaan daging saat ini hanya 8.457,24 ton dari total kebutuhan 67.971 ton per bulan.

Sumber: Badan Pangan Nasional

A portrait of Andien Aisyah, a woman with dark hair, wearing a leopard print top and a headband, sitting in a chair. The background is a light blue wall with a soft shadow behind her.

ANDIEN AISYAH

*Fasilitas Pendidikan
Bagi Warga Pemulung*

Foto-Foto : Instagram/[@andienaisyah](https://www.instagram.com/andienaisyah)

PENYANYI Andien Aisyah berkolaborasi dengan Yayasan Nara Kreatif meresmikan Sekolah Anak Percaya di kampung pemulung di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, untuk memfasilitasi warga yang belum mendapatkan akses ke pendidikan yang layak.

Sekolah Anak Percaya memberikan pendidikan kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP), serta kejar paket C (setara SMA) secara gratis, dengan menargetkan pendaftar baru usia 7-60 tahun.

Menurut Andien, menciptakan akses pendidikan yang layak dan menjadikan masyarakat Indonesia pintar merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengaku prihatin jika melihat anak yang terpaksa putus sekolah karena terkendala biaya.

"Peran saya dan Nara Kreatif di sini hanya untuk memberikan fasilitas dan motivasi bagi mereka, hingga akhirnya mereka dapat percaya dengan diri dan mimpi mereka sendiri," kata Andien melalui keterangan resmi yang diterima ANTARA pada Sabtu.

Senada dengan Andien, Ketua Yayasan Nara Kreatif Nezatullah Ramadhan juga mengatakan Sekolah Anak Percaya menjadi kesempatan bagi warga untuk kembali mengejar mimpi mereka.

Neza menganggap hal itu penting, karena pendidikan merupakan investasi bagi masa depan yang dapat membuat nilai dalam diri mereka menjadi lebih berarti.

"Berbeda dengan Sekolah Kejar Paket yang didirikan Nara Kreatif sebelumnya, Sekolah Anak Percaya dibangun khusus bagi warga kampung pemulung. Ke depannya, sekolah ini akan lebih luas didirikan di titik-titik kampung pemulung lainnya," ujar Neza.

Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nara Kreatif Ani Nur Sirejeki menambahkan, pendirian Sekolah Anak Percaya merupakan upaya baik untuk meningkatkan pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah.

Peresmian Sekolah Anak Percaya mendapatkan dukungan penuh dari Pembina Kampung Pemulung, Agus, yang juga menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan.

"Saya melihat banyak anak-anak di sini yang kegiatannya hanya mengumpulkan sampah, padahal pendidikan adalah modal penting bagi mereka, di mana di kemudian hari mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik," katanya.

Kegiatan peresmian Sekolah Anak Percaya dibarengi dengan penyuluhan gigi, serta kegiatan buka puasa bersama dengan mengundang figur publik dan tokoh masyarakat setempat.

Sekolah Anak Percaya di kampung pemulung Kelurahan Joglo Jakarta Barat menjadi titik kedua sekolah tersebut didirikan. Titik pertama pendirian Sekolah Anak Percaya berlokasi di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Karir

Andini Aisyah Hariadi lahir di Jakarta, 25 Agustus 1985. Ia adalah seorang penyanyi beraliran Jazz dengan debut album perdananya BISIKAN HATI yang dirilis Februari 2000.

Andien belajar bernyanyi sejak usia tiga tahun. Sejak mulai duduk di bangku kelas tiga Sekolah Dasar (SD), dirinya mulai mengikuti sejumlah festival musik. Dengan dorongan sang Ibu, Andien mengikuti pendidikan musik di EMS (Elfa Music Studio), pimpinan Elfa Secioria.

Andien memulai debutnya lewat album perdananya BISIKAN HATI pada tahun 2000. Sukses dengan album yang diperkirakan telah terjual lebih dari 30.000 kopi itu, Andien merilis kembali album keduanya, KINANTI (2002) dan GEMINTANG (2005)

Sukses dengan

karir solonya, Andien bersama dengan Nina Tamam, Iga Mawarni, Yuni Shara dan Rika Roeslan membentuk kelompok vokal lima perempuan, dengan nama 5 Wanita. Penyanyi mudah yang telah memulai karir dalam usia yang sangat muda tersebut akhirnya dapat melakukan berbagai variasi dalam karyanya.

Setelah berhasil dengan grup vokalnya, Andien kembali melakukan kolaborasi. Kali ini dia bekerja sama dengan Ungu untuk merilis single duet berjudul Saat Bahagia. (berbagai sumber)



PERESMIAN SEKOLAH ANAK PERCAYA DI KAMPUNG PEMULUNG JOGLO, JAKARTA BARAT

WASPADAI RISIKO KESEHATAN BILA MENUNDA WAKTU TIDUR

MENJALANKAN ibadah puasa selama bulan Ramadhan memiliki beragam tantangan, mulai dari tubuh yang terasa lemas hingga rasa kantuk yang sulit untuk dihindari terutama di siang hari.

Menunda waktu tidur bahkan hanya 34 menit dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi, menurut studi dalam jurnal Hypertension.

Seperti disiarkan Health pada 7 April lalu, studi itu melibatkan sebanyak 12.287 orang laki-laki dewasa yang kelebihan berat badan dan berada pada usia pertengahan.

Mereka ini berasal dari 20 negara berbeda dan ada di antara mereka yang terkena hipertensi.

Para peneliti menemukan, perubahan waktu tidur sekitar 30 menit meningkatkan risiko seseorang sekitar sepertiga terkena hipertensi.

Sementara variasi yang lebih besar seperti 90 menit menunjukkan peningkatan risiko hipertensi sebesar 92 persen.

Kemudian, mereka yang tidur lebih lambat yakni sekitar 34 menit secara tidak teratur dikaitkan dengan peningkatan hipertensi sebesar 32 persen.

Sementara itu, apabila waktu tidurnya mundur selama 43 menit atau terkadang bangun lebih lambat sekitar 43 menit dari biasanya maka ini dikaitkan dengan peningkatan hipertensi sebesar 8,9 persen.

Peneliti juga mempelajari durasi waktu tidur dan risiko hipertensi. Orang yang tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit yakni tidur kurang dari tujuh atau lebih dari sembilan jam secara konsisten berpotensi terkena hipertensi sebesar 20 - 30 persen.

Selain itu, orang dengan jumlah jam tidur yang berbeda setiap malam, sebanyak dua jam atau lebih berpeluang 85 persen lebih tinggi untuk mengalami hipertensi.

Menurut pakar kardiologi dari University Hospitals Harrington Heart and Vascular Institute Saderr Al-Kindi, MD, mengingat latar belakang eserta penelitian yang sebagian besar laki-laki, setengah baya, dan kelebihan berat badan, maka ada kemungkinan temuan ini tak bisa diterapkan pada populasi global yang lebih luas.

Orang yang berusia lebih muda, wanita, atau orang yang tidak kelebihan berat badan mungkin tidak berpeluang terkena hipertensi dari kebiasaan tidur yang tidak teratur.

Tetapi mengingat betapa umum orang mengubah waktu tidur dan durasi tidur mereka, baik untuk bekerja maupun alasan lainnya, hasil penelitian ini dapat memiliki implikasi besar.

Tekanan darah tinggi ditunjukkan dengan angka hasil pengukuran tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau lebih tinggi dan para peneliti menemukan tidur yang tidak teratur dapat



dianggap sebagai penanda risiko untuk kesehatan jantung yang buruk.

Puasa bukan menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Malahan, melakukan olahraga ringan sangat dianjurkan selama menjalankan puasa Ramadhan sehingga tubuh lebih bugar dan tak mudah mengantuk.

Beberapa jenis olahraga yang dilakukan selama Ramadhan seperti berjalan kaki atau bersepeda santai dengan durasi 30 menit sebanyak tiga sampai lima kali seminggu setelah sahur (Ant)

Google Kembangkan Teknologi Pelacakan Ponsel Mati

GOOGLE dikabarkan tengah mengembangkan teknologi untuk melacak keberadaan ponsel yang hilang meski dalam keadaan tidak aktif atau mati.

Dilansir dari Gizchina, Sabtu, kabar datang dari pembocor teknologi Kuba Wojciechowski yang mengungkapkan bahwa teknologi itu dikembangkan untuk ponsel besutan Google yakni Pixel.

Sebelumnya Google memang sudah memiliki fitur pelacakan perangkat bernama "Find My Device", namun fitur tersebut membutuhkan syarat bahwa perangkat harus dalam keadaan hidup dan tidak dapat digunakan apabila dalam kondisi mati.

Menurut informasi Kuba, fitur yang tengah dikembangkan Google agar bisa melacak ponsel dalam keadaan mati tersebut akan diberi nama "Pixel Power-off Finder".

Pada dasarnya, fitur ini berfungsi dengan mengaktifkan Bluetooth di perangkat setiap saat mirip seperti cara kerja iPhone besutan Apple.

Dengan demikian pelacakan tetap bisa dilakukan meski ponsel dalam kondisi tidak aktif.

Sebenarnya Google telah mengerjakan "Find My Device" generasi terbaru dalam periode setahun terakhir.

Harapannya Google bisa membuat jaringan pelacakan di perangkat Android mirip dengan cara kerja Apple di iPhone-nya.

Google bahkan sempat menggoda para pengguna Android terkait kemajuan pengembangan fitur "Find My Device" terbaru dengan mengenalkan opsi bernama "Store Recent Location" pada Januari 2023.

Ketika opsi tersebut diaktifkan, maka ponsel akan membagikan lokasinya dengan Google setiap kali baterai ponsel terdeteksi turun di bawah level tertentu.

Opsi tersebut diharapkan mampu memberi peringatan pertama bagi

penggunanya jika ponselnya mati sebelum pengguna menyadari gawainya hilang.

Belum ada kabar dari Google kapan atau apakah fitur pelacakan baru ini akan tersedia.

Namun tentunya pengembangan fitur "Find My Device" akan bisa diketahui dalam ajang Google I/O mendatang di 2023.

Anda juga bisa menggunakan IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk menemukan HP yang hilang dengan catatan telah tersambung dengan email.

Sebagai informasi, IMEI merupakan tanda pengenal yang dimiliki tiap perangkat dan tidak bisa diubah atau dihilangkan serta berbeda antara satu dengan lainnya.

MENEMUKAN PONSEL DENGAN IMEI

1. Ketik *#06# tanpa mengetuk tombol panggilan, lalu nomor IMEI akan langsung muncul secara otomatis.
2. Buka menu "Settings" di HP > "About Phone" atau "Tentang Ponsel". Lalu akan muncul informasi mengenai nomor IMEI HP.
3. Anda bisa meminta tolong pihak kepolisian atau provider melacak ponsel dengan nomor IMEI.

MENEMUKAN PONSEL DENGAN NOMER TELEPON

1. Buka aplikasi Google Maps dan masuk ke menu "Option", lalu menuju ke layanan "Friend List".
2. Pada layanan Friend List, masukkan nomor HP yang hilang untuk masuk ke proses pencarian.
3. Setelah itu, klik nomor provider tersebut dan tunggu beberapa saat.
4. Nantinya, akan muncul informasi terkait lokasi terkini HP yang digunakan pada nomor HP tersebut.
5. Anda bisa mengikuti rute tersebut menggunakan bantuan Google Maps (berbagai sumber)



KIAT SIMPAN BAHAN MAKANAN SAAT DITINGGAL MUDIK

MUDIK menjadi tradisi tahunan yang dinantikan oleh banyak orang di Indonesia. Namun, ketika mudik, terkadang kita harus meninggalkan rumah dan bahan makanan yang ada di dalamnya selama beberapa hari.

Menyimpan bahan makanan agar awet saat ditinggal mudik perlu banyak pertimbangan. Pertimbangan ini mencakup jenis bahan makanan apa yang harus disimpan.

Lalu, berapa banyak bahan makanan yang harus ada untuk kita konsumsi setelah selesai mudik, dan wadah apa yang cocok untuk menyimpan bahan makanan.

Bahan makanan yang ditinggal mudik Lebaran selama beberapa hari bisa cepat basi dan rusak jika tidak disimpan dengan benar, oleh karena itu mulai dari jenis bahan hingga

wadah perlu menjadi pertimbangan.

Berikut ini beberapa cara menyimpan bahan makanan agar awet saat ditinggal mudik seperti diizinkan dalam keterangan tertulis Titipku, Senin:

1. Buatlah persediaan makanan yang cukup

Sebelum berangkat, pastikan persediaan makanan cukup untuk beberapa hari pertama setelah pemudik kembali dari kampung halaman. Hal ini perlu dipertimbangkan karena biasanya pasar akan tutup saat dan setelah Idul Fitri. Simpan saja bahan secukupnya yakni untuk sehari hingga dua hari agar makanan yang disimpan tidak berlebihan.

2. Gunakan wadah penyimpanan yang kedap udara

Ketika menyimpan bahan makanan, pastikan menggunakan wadah yang kedap udara untuk menjaga agar makanan tetap segar lebih lama. Misalnya, gunakan kantong plastik yang dapat diikat erat atau kotak penyimpanan dengan tutup yang kedap udara. Penutupan wadah yang rapat juga menghindari bahan makanan dihindangi alat atau kutu.

3. Simpan di tempat yang sejuk dan kering

Simpan bahan makanan di tempat yang sejuk dan kering seperti kulkas atau lemari es. Pastikan suhu dalam kulkas diatur pada suhu yang tepat dan cukup dingin. Untuk bahan makanan yang tidak perlu disimpan di dalam kulkas, pastikan disimpan di tempat yang teduh dan jauh dari sinar matahari langsung.

4. Pisahkan bahan yang mudah rusak

Bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan cenderung cepat rusak jika disimpan bersama dengan bahan makanan lain. Pastikan untuk menyimpan bahan makanan yang mudah rusak seperti itu secara terpisah dalam wadah yang kedap

udara juga.

5. Kurangi penggunaan bahan makanan segar

Sebelum berangkat, cobalah untuk mengonsumsi atau memasak bahan makanan segar yang sudah dibeli agar tidak terbuang sia-sia. Bahan makanan segar lebih cepat busuk daripada bahan makanan beku atau makanan kaleng.

Sementara itu, bahan makanan yang telah dimasak seperti makanan kaleng atau makanan beku dapat lebih tahan lama dan lebih mudah disimpan, oleh karenanya sangat dianjurkan untuk pemudik membeli makanan beku atau makanan kaleng sebelum berangkat mudik untuk persiapan bahan makanan usai mudik (Ant)



Serangan Balik, ... (dari hal 1)

MANTAN Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro ternyata melaporkan sejumlah hal kepada Dewas. Salah satunya, ia mengaku pernah dipaksa membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTPK) suatu kasus yang sedang diselidiki KPK.

"Saya juga melaporkan adanya dugaan pemaksaan pembuatan Laporan Kejadian Tindak Pidana terhadap salah satu perkara penyelidikan sebelum adanya hasil ekpose yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana," kata Endar dalam keterangannya, Rabu (12/4/2023).

Endar mengatakan, pemaksaan tersebut melanggar aturan. Bahkan secara pidana, perbuatan itu melawan hukum. Sebab, ia dipaksa membuat LKTPK sebelum adanya hasil ekpose yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana.

Adapun forum ekpose biasanya digunakan untuk membahas sebuah kasus, apakah sudah memenuhi syarat untuk naik ke tingkat penyidikan. "Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan ini merupakan perbuatan melawan hukum," ujar Endar.

Meski demikian, Endar belum mengungkapkan pemaksaan yang dimaksud terkait kasus apa. Namun belakangan ini, mencuat sikap berbeda antara sejumlah mantan pejabat di KPK dengan pimpinan terkait dengan penanganan penyelidikan Formula E.

Penyelidikan Formula E mulai diumumkan KPK pada November 2021. Sudah setahun lebih penyelidikan ini berlangsung. Dalam beberapa kali gelar perkara, mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto; eks Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro; dan eks Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto, menilai perkara itu belum layak naik penyidikan. Sebab, belum memenuhi syarat ditemukannya cukup bukti adanya korupsi.

Sementara mayoritas Pimpinan KPK disebut-sebut meminta agar perkara segera naik tahap penyidikan, meski tidak disertai dengan penetapan tersangka. Selama ini, penetapan tahap penyidikan KPK selalu disertai adanya tersangka yang dijerat.

Ketiganya kini telah 'tersingkir' dari KPK. Melalui surat rekomendasi promosi dari Firli, Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Fitroh memutuskan untuk kembali ke Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk Endar, dia diberhentikan padahal belum genap bertugas selama 4 tahun, sebagaimana aturan.

Adapun laporan terhadap Dewas tersebut, dilakukan Endar karena dia meyakini telah terjadi pelanggaran yang serius. "Selama menjabat pada jabatan tersebut, saya berupaya untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku dan mengedepankan keadilan," kata Endar.

Setidaknya ada 3 laporan Brigjen Endar ke Dewas KPK. Salah satunya pemaksaan pembuatan LKTPK di atas. Laporan lainnya ialah soal

pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai tidak sesuai prosedur. Selain itu, ia juga melaporkan adanya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan yang sangat rahasia.

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Permasalahan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK masih terus berkembang. Bahkan, salah satunya berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Endar melaporkan Sekjen KPK Cahya H. Harefa dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas. Namun, KPK menilai pelaporan itu tidak tepat.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut bahwa pihaknya menghargai adanya pelaporan tersebut, baik ke Dewas KPK maupun ke pihak lainnya. Namun, menurut Ali, proses administrasi seorang pegawai sebagai individu pada sebuah institusi badan hukum, merupakan bagian dari persoalan manajemen kepegawaian. "Di mana proses administrasi kepegawaian tersebut tentunya merupakan ranah hukum administrasi kepegawaian," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/4/2023).

Penegakan hukum kepegawaian, tambah Ali, diatur dalam undang-undang, terdiri dari sengketa pegawai yang diselesaikan melalui upaya administratif. "Produk hukum dari administrasi kepegawaian adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan administrasi," ujar Ali.

Karena terkait KTUN, sehingga dinilai lebih tepat sengketa terkait Brigjen Endar melalui mekanisme PTUN. "Dalam persoalan tersebut, karena menyangkut produk KTUN, maka pengujian tentang adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak, salah prosedur atau tidak maupun salah substansi atau tidak, merupakan ranah peradilan tata usaha negara (PTUN)," ujar Ali. "Sehingga tidak tepat jika dibawa pada ranah pidana berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dimaksud," pungkasnya.

Di sisi lain, Dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapor ialah Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Wakil Ketua bernama Kurniawan Adi Nugroho. Laporan sudah tercatat bernomor: LP/B/1951/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Diterima SPKT Polda Metro Jaya pada 11 April 2023.

"Laporan ini terkait dengan bocornya hasil penyelidikan KPK atas tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan di Kementerian ESDM, yang ditemukan pada saat pengecekan di kantor ESDM," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Rabu (12/4/2023).

Kurniawan menambahkan, laporan disampaikan ke Polda Metro karena tempat kejadian perkara diduga berada di wilayah hukum Polda Metro yaitu Jakarta Selatan (KPK) dan Jakarta Pusat (Kementerian ESDM). Selain itu, ia

mempertimbangkan bahwa Kapolda Metro yang baru saja dilantik yakni Irjen Karyoto ialah mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. "Sehingga dia sangat paham dokumen mana yang termasuk dokumen rahasia dan mana yang konsumsi publik," tambah Kurniawan.

Dalam laporannya, Kurniawan melaporkan kebocoran dokumen itu dengan Pasal 54 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, ternyata yang dilaporkan oleh Kurniawan bukan terkait dokumen penyelidikan kasus tunjangan kinerja Kementerian ESDM yang selama ini ramai dibicarakan. Menurut dia, dokumen yang bocor itu terkait perkara lain yang juga masih terkait penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. "Info yang kami dapatkan, ini bukan laporan penyelidikan soal Tukin, tapi bidang pertambangan," ujar Kurniawan.

Ia tidak menuliskan siapa pihak terlapor dalam laporannya tersebut. Menurut dia, terlapor itu yang nantinya perlu diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Meski demikian, ia juga menyertakan data yang memuat adanya percakapan seorang pria yang memegang dokumen itu ketika penyidik KPK menggeledah ruangnya. Dalam video yang beredar di media sosial, pria tersebut kemudian menyebut bahwa dokumen itu 'Pak Menteri dapat dari Pak Firli'.

Kurniawan menyebut bahwa pria yang dimaksud diduga ialah Plh Dirjen Minerba Idris Sihite. Beberapa waktu lalu, KPK memang sempat menggeledah ruangan dan apartemen yang diduga ditempati Idris Sihite. Ia pun sempat diperiksa KPK. "Memang ada pernyataan dari Sihite [Plh Dirjen Minerba] dan itu juga yang kami sampaikan ke Polda Metro Jaya bahwa dia mendapatkan dokumen itu dari Menteri ESDM dan Menteri ESDM mendapatkannya dari Firli [Ketua KPK], namun karena itu masih pernyataan sepihak, dan tindak pidana yang dilaporkan adalah masuk delik biasa, yang tidak mewajibkan adanya pengaduan dari korban. Maka siapa terlapornya akan didalami oleh Polda Metro Jaya," pungkas Kurniawan.

Terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan ini, Firli Bahuri juga sudah diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Belum ada

pernyataan dari Firli Bahuri mengenai hal tersebut.

Sementara KPK menyatakan bahwa tidak ada kebocoran dokumen. Sedangkan terkait adanya pelaporan ke Dewas KPK, KPK mempersilakan laporan diproses. Kementerian ESDM pun turut membantah soal adanya kebocoran dokumen KPK itu.

Setelah muncul rekaman 'Pak Menteri dapat dari Firli' terkait dugaan kebocoran dokumen rahasia, kini beredar chat diduga pimpinan KPK dengan seseorang pejabat ESDM. Komunikasi pesan itu diduga antara Wakil Ketua KPK dengan pejabat ESDM. Ada beberapa potongan percakapan keduanya yang diduga membahas soal bisnis. Diawali dengan perkenalan dari pihak yang diduga pimpinan KPK pada 12 Oktober 2022. Chat itu ditujukan pada penerima tertulis atas nama Idris Sihite yang diduga ialah Kepala Biro Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

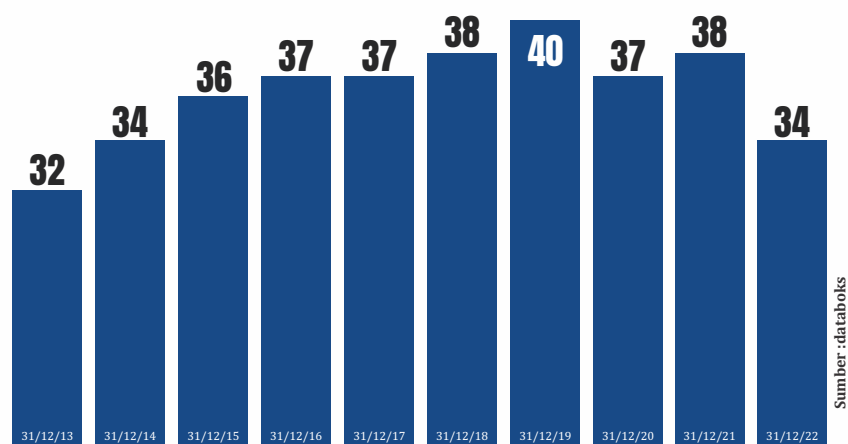
Chat selanjutnya ialah pada 19 Oktober 2022. Belum jelas konteks dalam percakapan yang terjadi. Hanya dalam salah satu bagian, pihak yang diduga Pimpinan KPK itu menyampaikan soal cari duit dengan buka kantor. Beberapa potongan percakapan diunggah akun Twitter @dimdim0783

"Waduh, masi bisalah kita cari duit, saya sdh buka kantor dgn teman, tp sy madi main di belakang layar, kita bisa bergabunglah main di belakang layar RHS cuma tuk konsumsi kita aja," chat diduga Pimpinan KPK. "Mantaaaaap pak," jawab diduga Idris Sihite.

"Iya, sy pun agak terlambat tp sejak thn 2012 sy mulai diminta teman2 tuk bantu2 di perusahaan mereka tnp tdk full time. Hal tsb sy lakoni krs sy sadar bhw tdk ada pimpinan Kejaksaan yg mau perhatian kita, jd sy perlu berpikir n menyikapi langkah yg tepat tuk mengatasi kebutuhan hidup di Jkt ini yg penuh tantangan hidup. Sekarang sy mulai coba buka kantor dgn teman, salah 1 kawan saya marga purba, bukan dr Kejaksaan. Kerjaan sy carikan klien, diskusi dgn klien n ikut membuat konsep yg akan dikerjakan, nanti teman2 yg maju siang atau negosiasi dgn pihak lawan. Kalau kita cuma harap gaji, ras (chat terputus)," ujar dDiduga Pimpinan KPK.

"Bagus sekali pak," ujar diduga Idris Sihite. (wid,rls,kum,mer,rep/dya)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA (2013-2022)



Banding Ditolak, Sambo Tetap Dihukum Mati



Sidang putusan banding dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PT DKI, Rabu (12/4/2023) menguatkan putusan Sambo dihukum mati. Sambo tampak tak hadir dalam sidang tersebut. (istimewa)

JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo. Diketahui, Ferdy Sambo mengajukan banding usai divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023). "Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan," ucapnya.

Dalam kasus ini, terdapat lima terdakwa. Selain Ferdy Sambo, ada tiga terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. Mereka adalah Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Ricky Rizal atau Bripka RR (ajudan Ferdy Sambo), dan Kuat Ma'ruf (asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo). Terdapat satu terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Bharada E yang tidak mengajukan banding.

Kelima terdakwa dinilai majelis hakim telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Terkait perkara ini, Ferdy Sambo juga terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan bersama anak buahnya dalam

pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Dalam putusan PN Jakarta Selatan, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada para terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Bharada E pidana 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan.

Sementara itu, Ferdy Sambo divonis pidana mati dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim memvonis ketiganya selama delapan tahun. Istri Ferdy Sambo itu divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara.

Adapun pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat jenderal bintang dua marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak dua-tiga kali oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Keluarga Yosua Bersyukur

Terpisah, Ibunda almarhum Brigadir N Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, pun bersyukur.

"Saya sebagai ibu korban sangat

menghargai dan menghormati keputusan dari pengadilan tinggi DKI Jakarta," kata Rosti Simanjuntak, Rabu (12/4/2023).

Menurut Rosti, ditolaknya banding Sambo merupakan bentuk keadilan yang diberikan kepada masyarakat kecil, termasuk kepada keluarga almarhum Yosua. Dia pun berharap tidak ada lagi kasus serupa. "Kami berharap keadilan terus ada untuk masyarakat kecil, dan kami sangat bersyukur kami masih menerima keadilan itu dalam kasus anak kami ini," ucap Rosti.

Sementara itu, tante almarhum Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak, mengaku senang atas penolakan banding Sambo itu. Bagi Roslin, jika banding Sambo ditolak, hukumannya akan tetap terlaksana. "Puji Tuhan-lah, hukumannya bisa tetap mati," ujar Roslin.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md merespons putusan tersebut. "Itu sepenuhnya adalah independensi dan keyakinan Majelis Hakim di PT DKI Jakarta," kata Mahfud, Rabu (12/4/2023).

Mahfud menilai hakim-hakim persidangan sudah benar. Sebab putusan PT DKI yang dikeluarkan menguatkan putusan tingkat pertama. "Jika PT menguatkan putusan PN (Pengadilan Negeri), maka berarti judex facti selama persidangan di PN sudah benar," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam kesempatan itu, Kapolri meminta maaf atas kegaduhan yang

ditimbulkan sejumlah kasus hukum yang melibatkan anggotanya. Mulai dari kasus penembakan di Jalan Duren Tiga yang melibatkan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan Malang hingga narkoba yang melibatkan eks Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Teddy Minahasa.

"Selain anggota termotivasi untuk lakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga lakukan tindakan-tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan mencederai hati masyarakat," kata Kapolri. (wid,rls,ant,rep/dya)

Daftar hukuman Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua:

- 

FERDY SAMBO
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan/Kadiv Propam Polri

 - Waktu Vonis: Senin, (13/02/2023)
 - Tuntutan: Pidana Penjara Seumur Hidup
 - Vonis: hukuman mati
- 

PUTRI CANDRAWATHI
Istri Ferdy Sambo

 - Waktu Vonis: Senin, (13/02/2023)
 - Tuntutan: Penjara 8 tahun
 - Vonis: Penjara 20 tahun
- 

KUAT MA'RUF
Asisten Rumah Tangga / ART Ferdy Sambo

 - Waktu Vonis: Selasa, (14/02/2023)
 - Tuntutan: Penjara 8 tahun
 - Vonis: Penjara 15 tahun
- 

RICKY RIZAL
(Bripka RR) Mantan Ajudan Ferdy Sambo

 - Waktu Vonis: Selasa, (14/02/2023)
 - Tuntutan: Penjara 8 tahun
 - Vonis: Penjara 13 tahun
- 

RICHARD ELIEZER
(Bharada E) Mantan Ajudan Ferdy Sambo

 - Waktu Vonis: Tahun, (15/02/2023)
 - Tuntutan: Penjara 12 tahun
 - Vonis: Penjara 1 tahun 6 bulan